ARTI PENTING DIBENTUKNYA PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA

Nama Mahasiswa : Fauzi Akil Hibatuhllah

E-mail : fauziakil29@gmail.com

No.Bp : 1910003600012

Universitas Ekasakti

TA 2020/2021

A. Pendahuluan

Negara RI adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka termasuk di dalamnya ada Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan PTUN) dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan KTUN). Berbagai macam KTUN dapat digugat ke PTUN, hal ini disebabkan berbagai macam perbuatan pejabat tata usaha negara seperti perijinan (*vergunning*), dispensasi, konsesi, dan pengurusan surat-surat dituangkan dalam bentuk keputusan pejabat (*beschikking*). Salah satu KTUN yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah izin di bidang lingkungan.

Persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, maka substansi pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang terwujudnya sistem pembangunan berkelanjutan

(*sustainable development*), apabila administrasi pemerintahan dapat berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi adanya pencemaran dan perusakan lingkungan adalah melalui sistem perizinan. Perizinan adalah merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling mendasar yang ditujukan untuk dapat menjaga kepentingan lingkungan dan keseimbangan ekologis, yang pada akhirnya tetap dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Dalam prakteknya sistem perizinan belum mampu berfungsi sebagai pengendali agar suatu usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Suatu usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai potensi besar dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dinilai layak lingkungan dan diberikan izin. Dalam kasus lain, suatu usaha dan/ atau kegiatan yang telah dilengkapi dengan izin, dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan dampak berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam hal yang demikian, organisasi lingkungan hidup dapat menggugat pejabat yang mengeluarkan KTUN untuk usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi atau telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup tersebut ke Pengadilan TUN. Dalam sengketa lingkungan tersebut, organisasi lingkungan hidup memohon agar KTUN untuk usaha dan/atau kegiatan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut KTUN tersebut. Dengan dicabutnya KTUN untuk usaha dan/ atau kegiatan tersebut, diharapkan kegiatan dan/atau usaha

yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan tidak terjadi atau dihentikan, sehingga kelestarian lingkungan dapat tetap terpelihara.

Maksud adanya peradilan adalah memberikan keadilan kepada para pihak dan demikian menghilangkan sengketa. Sengketa merupakan sesuatu yang mengganggu ketentraman, tata tertib, dan kedamaian masyarakat, sehingga keseimbangan masyarakat tergoncang karenanya. Dengan adanya peradilan termasuk PTUN diharapkan kegoncangan dalam masyarakat akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dapat dipulihkan. Namun demikian, sengketa- sengketa lingkungan yang telah diselesaikan oleh PTUN dalam kenyataannya belum menghilangkan konflik yang ada. Kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi atau telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap mengantongi izin dan tetap menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pencemaran atau kerusakan lingkungan masih terus berlangsung yang menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, maka ada dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimanakah fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan. Kedua, apa saja kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan fungsi PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan.

B. Pembahasan

1. Arti Penting Dibentuknya Hukum Tata Usaha Negara

Sebagai berwujud dan Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk melaksanakan amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili.

Adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.

2. Hukum dan Wewenang

Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang: “Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)”.

Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Subjek di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sedangkan yang menjadi Objek di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*).

3. Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)

- Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Fungsi PTUN dalam Memberikan Perlindungan terhadap Kelestarian Lingkungan

Fungsi PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya memberikan perlindungan Dalam hal lingkungan hidup yang menderita karena telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka lingkungan hidup diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup (organisasi lingkungan hidup) dapat menggugat pejabat dan/atau badan tata usaha negara ke Pengadilan TUN karena pejabat dan/atau badan yang bersangkutan telah memberikan izin kepada perusahaan yang kegiatannya potensial atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dasar hak gugat organisasi lingkungan hidup adalah Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - (a) berbentuk badan hukum;
 - (b) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - (c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Diberikannya hak gugat terhadap organisasi lingkungan hidup, diharapkan organisasi lingkungan hidup tersebut dapat berperan dalam memperjuangkan upaya pelestarian lingkungan melalui pengadilan, termasuk di antaranya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Aan Effendi, penyelesaian sengketa lingkungan melalui PTUN memiliki kelebihan-kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan di peradilan umum, baik itu melalui gugatan perdata maupun tuntutan secara pidana. Penyelesaian sengketa melalui PTUN adalah bertujuan untuk membatalkan izin lingkungan yang dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan dibatalkannya izin lingkungan tersebut berarti suatu usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melanjutkan lagi usaha dan/atau kegiatannya sehingga sumber pencemarannya dapat dihentikan. Di dalam praktiknya,

kelebihan yang disampaikan Aan Effendi ini sulit untuk direalisasikan melalui gugatan organisasi lingkungan hidup. Gugatan- gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup ke PTUN sering mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup.

C. Penutup

Fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan adalah belum optimal. Putusan-Putusan Pengadilan TUN yang obyek sengketa di bidang lingkungan hidup belum memberikan perlindungan kelestarian secara optimal, karena hakim cenderung bersifat prosedural formalistik dalam menggunakan pertimbangannya, dan kurang menyentuh substansi atau pokok perkaranya terkait dengan lingkungan hidup dan kelestariannya. Dalam beberapa Putusan Pengadilan TUN yang obyek sengketa sama yaitu mengenai

kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan diputus secara bertentangan dan lebih memihak kepada pemilik modal besar daripada memberikan perlindungan terhadap kelestarian hutan. Belum optimalnya fungsi PTUN disebabkan adanya kendala-kendala yang meliputi kendala terhadap peraturan perundang-undangan, kendala terhadap asas-asas hukum, dan kendala terhadap pelaksana hukum.

Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang: “Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)”.

Saran untuk mengatasi belum optimalnya fungsi PTUN adalah melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan; memasukkan asas pembangunan berkelanjutan dan asas pencegahan dini sebagai dasar pengujian KTUN obyek sengketa dalam penyelesaian sengketa di PTUN; segera dibentuk Pengadilan TUN di tiap kabupaten/ kota dan Pengadilan Tinggi TUN di tiap provinsi; memberikan

sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pejabat yang tidak melaksanakan Putusan PTUN; dibentuk pengadilan khusus lingkungan di bawah Peradilan Tata Usaha Negara yang diharapkan mampu memeriksa dan mengadili sengketa secara mendalam dari aspek substansinya.

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Republica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.